



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

4.1 Letak Geografis

Kelurahan Tanah Merah memiliki empat Lingkungan, yaitu Lingkungan I, Lingkungan II, Lingkungan III, dan Lingkungan IV. Adapun Luas Kelurahan Tanah Merah dan batas Kelurahan Tanah Merah adalah sebagai berikut:

Luas Kelurahan Tanah Merah lebih kurang 11000 ha. Dari luar wilayah kecamatan pasir penyu, jarak dari ibu kota provinsi lebih kurang 148 Km ditempuh dengan waktu 4-5 jam perjalanan, jarak dengan Kota Kabupaten lebih kurang 56 Km dan jarak ibu kota kecamatan yaitu kurang lebih 11 Km. Kelurahan Tanah Merah berkedudukan disebelah Utara Ibu Kota Kecamatan secara Administrasi wilayah Kelurahan Tanah Merah terbagi menjadi Empat Lingkungan, 9 Rukun Warga dan 15 Rukun Tetangga, dengan batas wilayah yaitu:

- Sebelah Utara :Kelurahan Sekar Mawar
- Sebelah Timur :Desa Sidomulyo
- Sebelah Selatan :Desa Sungai Sagu
- Sebelah barat :Perkebunan PT TPP

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Kondisi Kelurahan Tanah Merah merupakan wilayah daratan yang tanahnya terdiri dari tanah Liat. Sedangkan Kondisi lahan sebagian besar merupakan tanah yang berkultur tanah liat. Kelurahan Tanah Merah merupakan Daerah dataran tinggi yang memiliki kondisi geografis yang rata, dengan tingkat kelembaban diantara 90-100% serta curah hujan yang berkisar 7 bulan pertahunnya.

Secara geomorfologi Kelurahan Tanah Merah daratan tinggi sehingga di daerah daratan dapat dimanfaatkan untuk perkebunan tanaman keras seperti kelapa, Karet, sawit, dan lain sebagainya.

4.2 Demografis

4.2.1 Keadaan Penduduk

Berdasarkan Data Administrasi Pemerintahan Kelurahan, Jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi pada tahun 2018 berjumlah 3477 jiwa dengan rincian penduduk laki-laki berjumlah 1583 jiwa dan perempuan berjumlah 1894 jiwa. Data kependudukan diambil berdasarkan blangko yang diisi oleh ketua RT dilingkungan masing-masing.

4.2.2 Jumlah Penduduk

Tabel4.1

Jumlah penduduk Kelurahan Tanah Merah berdasarkan strktur usia tahun 2018

No	Kelompok Usia	Jumlah
1	>00-12 Bulan	43 jiwa
2	>01-05 Tahun	271 jiwa
3	>06-07 Tahun	237 jiwa
4	>08-15 Tahun	386 jiwa
5	>16-25 Tahun	1903 jiwa
6	>57 Tahun	637 jiwa
Jumlah		3477 jiwa

Sumber Data: Kantor Kelurahan Tanah Merah 2018

4.3 Tingkat Pendidikan

Penduduk Kelurahan Tanah Merah berdasarkan laporan yang dimiliki oleh Kantor Kelurahan Tanah Merah pada tahun 2018 mempunyai pendidikan yang tergolong cukup baik dengan data yang diperoleh sebanyak:

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk Kelurahan Tanah Merah berdasarkan struktur pendidikan tahun 2018

No	Pendidikan	Jumlah
1	Belum sekolah	199 Jiwa
2	Sedang TK/Playgroup	233Jiwa
3	Sedang sekolah SD/SLTA	599 Jiwa
4	Tidak Pernah Sekolah	779 Jiwa
5	Tamat Sekolah SD	642 Jiwa
6	Tidak Tamat SD	221 Jiwa
7	Tidak Sekolah SLTP	101 Jiwa
8	Tidak Tamat SLTP	77 Jiwa
9	Tamat Sekolah SLTA	289 Jiwa
10	Tidak Tamat SLTA	79 Jiwa
11	Tamat DI s/d D3	105 Jiwa
12	Tamat S1	114 Jiwa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13	Tamat S2/S3	39 Jiwa
14	Tamat SLBA	0 Jiwa
Jumlah		3477 Jiwa

Sumber Data: Kantor Kelurahan Tanah Merah 2018

4.4 Mata Pencarian

Ditinjau dari mata pencarian bahwa di Kelurahan Tanah Merah mayoritas bekerja pada sektor pertanian. Adapun komoditas pertanian yang utama adalah kelapa, karet, sawit. Oleh karena itu diharap kepada pemerintah lebih memperhatikan pada sektor pertanian baik itu dari segi modal ataupun alat yang menunjang didalam memproduksi hasil pertanian.

Tabel 4.3

Jenis mata pencarian Kelurahan Tanah Merah Tahun 2018

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	684 Jiwa
2	Buruh Harian Lepas	489 Jiwa
3	TNI/POLISI	9 Jiwa
4	Penguasa Kecil dan Menengah	126 Jiwa
5	PNS	49 Jiwa
6	Wiraswasta	157 Jiwa
7	Supir	27 Jiwa
8	Nelayan	0 Jiwa
9	Ibu Rumah Tangga	715 Jiwa
10	Pelajar/Mahasiswa	541 Jiwa
11	Belum/Tidak bekerja	468 Jiwa
12	Anggota DPRD Kab./Prov.	0 Jiwa
13	Honorar	212 Jiwa
Jumlah		3477 Jiwa

Sumber Data: Kantor Kelurahan Tanah Merah 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.5 Sarana Pendidikan

Adapun sarana pendidikan yang ada di Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan jenis sekolah yaitu, PAUD 1 buah, Sekolah dasar (SD) 1 buah, Sekolah menengah pertama (SMP) 1 buah, Sekolah menengah atas (SMA) 1 buah.

4.6 Agama

Kehidupan beragama di Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu sangat menghargai antar agama dan damai antar sesama pemeluk agama.

Tabel 4.4

Jumlah Penduduk berdasarkan Agama yang dianut oleh masyarakat Kelurahan Tanah Merah tahun 2018

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	2963 Jiwa
2.	Kristen	366 Jiwa
3.	Protestan	108 Jiwa
4.	Hindu	31 Jiwa
5.	Budha	9 Jiwa
Jumlah		3477 Jiwa

Sumber Data: Kantor Kelurahan Tanah Merah 2018

4.7 Profil UEK-SP Makmur

Kelurahan Tanah Merah merupakan salah satu Kelurahan yang dikatakan beruntung dengan mendapatkan kepercayaan dari Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu untuk mengelola dana kerakyatan sebesar Rp.500.000.000., dimana dana ini diberikan oleh Pemerintahan dengan tujuan untuk menjalankan program

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemberantas kemiskinan ditingkat Kecamatan dengan menitik beratkan upaya Pemerintahan Kabupaten dalam hal pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan sebagai pendekatan operasional. Selain itu, pemberian dana dari pemerintahan Kabupaten kepada Kecamatan yang kemudian dilanjutkan dengan pemberian Dana Usaha Desa/Kelurahan ini digunakan sebagai wujud komitmen Pemerintah dalam hal upaya mensejahterakan masyarakat Desa/Kelurahan.

Program tersebut dikenal dengan Program Pemberdayaan Desa/Kelurahan, program ini dikeluarkan oleh Pemerintah guna mencari solusi bagi masyarakat Desa/Kelurahan yang dalam implementasinya berbentuk kegiatan regular rencana pembangunan sektoral dan kegiatan ekonomi makro yang berbagai tempat dikenal dengan Usaha Ekonomi Kelurahan-Simpan Pinjam (UEK-SP). Program Pemberdayaan Desa/Kelurahan adalah satu program yang dijalankan Pemerintahan Provinsi Riau yang bertujuan untuk mengentas kemiskinan yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 15 Tahun 2006 dan ini merupakan Program Gubernur Riau yang dikenal dengan nama Program Kemiskinan, Kebodohan, dan infrastruktur (K21).

Selain itu program ini bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan berdasarkan pengembangan ekonomi masyarakat dengan memberdayakan Dana Usaha Desa. Selain itu Program tersebut dengan cara memperkuat kelembagaan Desa/Kelurahan dan meningkatkan peran aktif Dinas Sektoral untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana bagi masyarakat Desa/Kelurahan, serta mendorong sistem pemabangunan pasrifasif. Program Pemabangunan Desa/Kelurahan merupakan kewajiban pemerintahan sesuai

dengan agenda utama Pemabangunan Nasional sebagaimana yang tertuang dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas) 200-2004 serta dalam Keputusan Gubernur Riau Nomor 592/IX/2004.

Atas dasar surat edaran dari Pemerintah, maka pada tanggal 13 mei 2015 bertempat dikantor Kelurahan Tanah Merah, seluruh komponen masyarakat Kelurahan Tanah Merah yang terdiri dari Kepala Kelurahan, Pengurus BPD, Pengurus LKMD, Ketua-ketua RT/RW, Tokoh Masyarakat, Lembaga Kepemudaan, Lembaga Kewanitaan, serta kelompok masyarakat perempuan miskin yang secara umum melakukan musyawarah secara mufakat untuk membentuk lembaga usaha Kelurahan Simpan Pinjam yang dinamakan dengan “UEK-SP MAKMUR”. Dan dari musyawarah tersebut terbentuklahkepengurusan yang terdiri dari:

- Otoritas DUD (Kepala Desa, Ketua LKMD, Tokoh Perempuan)
- Pengawas Umum (Ketua BPD)
- Kader Pemabangunan Masyarakat (KPM)
- Pengelola (Ketua, Tata Usaha, Kasir, dan Staff Analisa Kredit)

Tindak lanjut dari musyawarah Desa/Kelurahan tersebut maka ditunjuklah kepengurusan UEK-SP Makmur dengan SK Kepala Kelurahan Tanah Merah pada tanggal 16 Mei 20015 Nomor 09/KPTS/2015. Dalam pelaksanaan tugasnya UEK-SP Makmur mempunyai tugas penting yang harus dilaksanakan yaitu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau

mewujudkan suatu pemberdayaan masyarakat melalui bantuan modal usaha yang bertujuan peningkatan ekonomi masyarakat.

Harapan masyarakat yang cukup besar akan terbentuknya Lembaga Keuangan mikro ini nantinya dapat mendorong kegiatan perekonomian Masyarakat Desa/Kelurahan serta meningkatkan peran masyarakat dalam mengelola dana Desa/Kelurahan. Dilihat dari kultur daerah, sosial masyarakat serta potensi yang ada di Kelurahan Tanah Merah, Dana Usaha Desa yang diberikan oleh Pemerintahan daerah maju dengan pesat sesuai dengan ketentuan yang ada. Terlihat jelas partisipasi masyarakat sehingga dalam setahun terdapat tiga kali penciran dana sebesar Rp.1.163.000.000,.

Banyak sektor-sektor ekonomi yang baik modal dengan bergulirnya dana pinjaman ini kepada masyarakat, terutama dalam sektor jasa, perkebunan, perdagangan, peternakan, dan perikanan. Keadaan ini tentunya membuka peluang kerja lapangan. Roda organisasi berjalan sesuai dengan tuntutan PEDUM dan JUKNIS PPD dan ditambah lagi dengan adanya perhatian secara khusus oleh otoritas DUD dan juga Kepala Kelurahan terhadap lembaga ini sehingga tim dapat bekerja secara utuh dan benar. Secara umum UEK-SP Makmur berjalan maju, dinamis dengan sebuah rangkaian dan harapan untuk mandiri menjadi lembaga keuangan mikro yang bisa bersaing dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Persyaratan Pemanfaat Dana Usaha Program

Pada dasarnya seluruh anggota masyarakat di Desa/Kelurahan berhak mendapatkan pinjaman dari Dana Usaha Program Desa/Kelurahan dengan kriteria:

- a. Warga Desa/Kelurahan yang telah berdomisili tetap di Desa/Kelurahan bersangkutan selama minimal 5 tahun.
- b. Tercatat sebagai anggota aktif UEK-SP dan telah memiliki simpanan pokok sebesar minimal Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).
- c. Memiliki usaha dan atau rencana usaha.
- d. Dinilai layak oleh staff analisis kredit baik secara administrasi maupun usaha.
- e. Peminjaman perorangan diwajibkan menggunakan anggunan.
- f. Surat pernyataan kesanggupan tanggung renteng harus dibuat diatas kertas bermatrai dengan menyebutkan sumber dana yang akan digunakan untuk tanggung renteng, ditandai oleh surat anggota pinjaman.
- g. Pendamping desa/kelurahan wajib memfasilitasi seluruh pinjaman dalam proses verifikasi. Untuk pinjaman dengan nilai lebih dari Rp. 15.000.000,- sampai dengan Rp.20.000.000,- harus ada rekomendasi Koordinator kecamatan dalam penentuan kelayakan usahanya. Untuk pinjaman lebih dari Rp.20.000.000,- sampai dengan Rp.30.000.000,- harus ada rekomendasi Koordinator Kabupaten untuk proses verifikasinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Maksimal pinjaman ke Lembaga UEK-SP adalah rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah). Batas maksimal ini dapat disepakati di Desa/Kelurahan untuk memperkecilnya, misalnya maksimal Rp.15.000.000,-.
- i. Pinjaman yang dinilai baik (Pengembalian tepat waktu,tidak pernah menunggak) dapat diberikan tambahan pinjaman sebesar 50% dari nilai pinjaman pertama. Tambahan pinjaman dapat diberikan melebihi 50% apabila dana UEK-SP tersedia khusus bagi pinjaman yang mengajukan pinjaman pada tahap ketiga.
- j. Untuk membantu usaha yang sudah berkembang dengan baik, Pengelola UEK-SP, Pendamping desa hendaknya dapat membantu memfasilitasi pinjaman tersebut ke lembaga keuangan lainnya.
- k. Kepala Desa, Aparat Desa/Kelurahan yang akan meminjam dana UEK-SP harus memiliki usaha dan mendapat rekomendasi dari Badan Pemberdayaan dan Pemerinta Desa Kabupaten.
- l. Pelaku PPD tingkat Desa/Kelurahan yang akan meminjam dana UEK-SP harus memiliki usaha dan direkomendasi dari Pendamping Desa/Kelurahan dan Koordinator Desa.
- m. PD tidak dibenarkan baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan dan meminjam dana UEK-SP melalui pihak ketiga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Kelayakan Usaha

- a) Relatif cepat menghasilkan, satu siklus maksimum 18 bulan untuk pinjaman tahap pertama dari alokasi dana awal (DUD/K), siklus 24 bulan dapat memberikan apabila pinjaman pertama telah dilunaskan.
- b) Memanfaatkan sebanyak mungkin potensi yang ada di Desa/Kelurahan.
- c) Memberikan manfaat baik langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat miskin.
- d) Dalam jangkauan kemampuan manajerial dan teknologi yang ada di Desa/Kelurahan.
- e) Tidak termasuk dalam daftar larangan.

3. Kriteria Peminjam

Kriteria kelompok yang layak mengajukan pinjaman Dana Usaha Desa/Kelurahan melalui UEK-SP Yaitu:

- a) Memiliki kepengurusan yang jelas.
- b) Mempunyai anggota minimal 10 orang pengurus.
- c) Mempunyai aturan-aturan kelompok yang tertulis, walaupun secara sederhana.
- d) Mempunyai alamat sekretariat/posko yang jelas.
- e) Mempunyai papan nama kelompok di sekretariat/posko.
- f) Mempunyai buku daftar anggota kelompok dan jenis usaha ekonomi setiap anggota kelompok.
- g) Mempunyai catatan terhadap transaksi yang dilakukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h) Mempunyai rencana kerja walau sederhana.
- i) Mempunyai jadwal pertemuan rutin dan catatan hasil pertemuan.
- j) Mempunyai tabungan atau simpanan kelompok.
- k) Mempunyai surat pengesahan dari Kades/Lurah.

4. Perguliran

- a) UEK-SP dapat meminta mandate dari forum Musyawarah Desa/Kelurahan untuk mengelola Dana Usaha Desa/Kelurahan dalam periode tertentu serta melakukan perguliran terhadap dana yang telah dikembalikan, kepada Anggota/Kelompok pemanfaat yang telah di verifikasi dan dinilai layak serta belum mendapat pinjaman dari Dana Usaha Desa/Kelurahan pada tahap sebelumnya.
- b) Desa/Kelurahan yang lokasi sulit, transformasi terbatas dan jauh dari bank maka perguliran dapat dilakukan tanpa melakukan setoran rekening DUD/K dengan catatan masa pinjaman menurun.
- c) Perguliran dilakukan setelah Dana Usaha Desa terserap semua. Musyawarah perguliran dilakukan apabila dana pengembalian pertama sudah diterima oleh pengelola UEK-SP.
- d) Kelompok/anggota pemanfat yang telah melunasi pinjaman dapat mengajukan pinjaman berikutnya dengan ketentuan dan proses verifikasi seperti semula.

5. Agunan

- a) Keamanan agunan menjadi tanggung jawab pengelola UEK-SP.
- b) Pengelola UEK-SP wajib menyediakan tempat penyimpanan dokumen agunan, biaya yang timbul dibebankan pada dana operasional UEK-SP dan atau dana operasi Desa/Kelurahan.
- c) Letak agunan dibolehkan diluar desa, dengan syarat biaya pemeriksaan ditanggung calon peminjam.
- d) Pengelola UEK-SP wajib membuat daftar inventaris agunan dan dipegang oleh pengelola UEK-SP dan Pemerintah Desa/Kelurahan.
- e) Agunan dalam bentuk barang bergerak yang dapat diterima adalah berupa kendaraan roda empat, roda dua yang mempunyai nilai ekonomi dengan menyerahkan bukti BPKB.
- f) Nilai agunan barang bergerak dihitung pada akhir jatuh tempo
- g) Besarnya nilai pinjaman dengan agunan barang bergerak adalah maksimal 40% dari nilai agunan yang dihitung pada akhir peminjam/akhir jatuh tempo.
- h) Besarnya nilai pinjaman dengan agunan barang tidak bergerak adalah maksimal 50% dari nilai agunan.
- i) Agunan barang bergerak bila terjadi kehilangan masih dalam jaminan pinjaman maka peminjam harus mengganti agunan yang hilang dengan agunan yang baru untuk melunasi pinjaman.
- j) Penetapan nilai agunan yang dilakukan oleh staf analisis kredit berdasarkan criteria yang berlaku dilingkungan masyarakat setempat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- k) Mekanisme peminjam BPKB yang digunakan untuk kegiatan perpanjangan STNK dan pembayaran pajak, harus dinyatakan secara tertulis antara peminjam dengan pengelola UEK-SP yang diketahui oleh Pemegang otoritas Desa/Kelurahan dan setelah itu harus dikembalikan paling lambat 3 hari setelah kepengurusan.
- l) Surat pernyataan kesanggupan tanggung jawab renteng bagi kelompok masyarakat miskin.

6. Tata Cara Penyitaan Agunan

Penyitaan agunan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Apabila pinjaman sudah sampai batas waktu jatuh tempo tidak melunasi pinjaman maka dilakukan penyitaan oleh pengelola UEK-SP yang diatur berdasarkan kesepakatan yang ditetapkan pada sanksi Musyawarah Desa/Kelurahan.
- b) Selanjutnya agunan tersebut dijual kepada pihak ketiga untuk melunasi sisa pinjaman dan apabila ada kelebihan akan dikembalikan kepada yang bersangkutan.
- c) Apabila agunan tersebut belum terjual maka akan menjadi jaminan sitaan UEK-SP maka pinjaman dianggap lunas dan apabila telah terjual kembali, sisa lebih nilai jual dikembalikan kepada pemilik agunan.
- d) Dalam melakukan penyitaan agunan melibatkan Aparat Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Aparat Penegak Hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

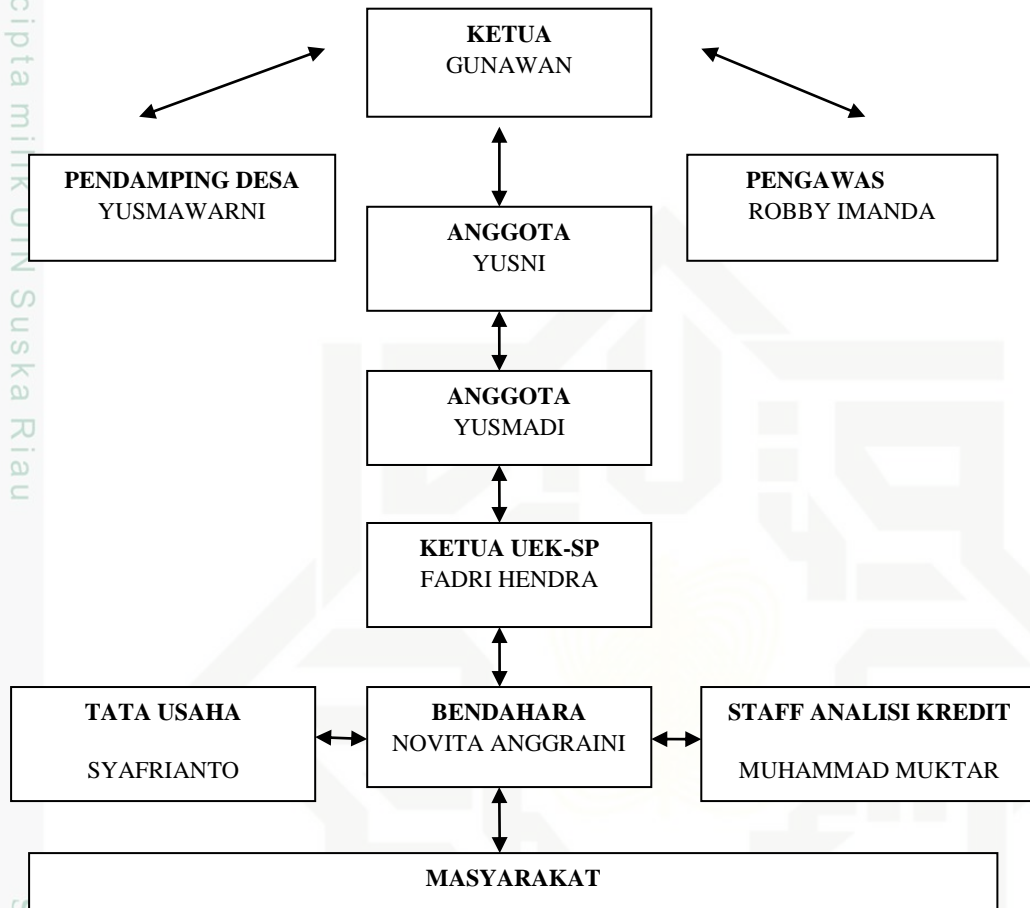
- e) Kebijakan lain yang belum diatur dapat dilakukan melalui Musyawarah Desa/Kelurahan.

4.8 Pengelola UEK-SP Makmur

1. Organisasi

Pengorganisasian adalah penetapan struktur peran-peran melalui penentuan berbagai aktifitas yang dibutuhkan untuk pencapaian tujuan. Organisasi merupakan suatu badan yang didalamnya terdapat orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai, maka orang-orang tersebut harus diatur sedemikian rupa sehingga masing-masing tahu akan tugas dan tanggung jawab yang diembannya serta wewenangnya. Penyusunan organisasi ini disebut dengan struktur organisasi. Pembagian dari masing-masing tugas tersebut tentunya akan lebih efektif bila dibantu dengan struktur organisasi yang tepat dan baik, karena tanpa adanya struktur organisasi ini akan menjadi sulit menentukan kepada siapa suatu tugas dan wewenang diberikan dan kepada siapa pulatanggung jawab dapat dimintai bila terjadi kesalahan dan kekeliruan. Demikian halnya dengan UEK-SP Makmur dalam mencapai tujuannya. Untuk pelaksanaan kegiatan Dana Usaha Desa dibutuhkan secara khusus lembaga dan pengurus UEK-SP yang dibentuk berdasarkan Musyawarah Desa/Kelurahan yang dipimpin dan difasilitasi oleh pendamping bersama Kepala Desa/Kelurahan yang selanjutnya disahkan SK nya oleh Kepala Kelurahan Tanah Merah.

Gambar 4.1 Struktur Organisasi UEK-SP Makmur Kelurahan Tanah Merah



Sumber data : Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Kelurahan, Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Pasir Penyutahun 2018

2. Administrasi

Tugas dan Tanggung Jawab Pengelola

a) Ketua

Bertugas memimpin organisasi UEK-SP, melakukan pengendalian dan pembinaan, mengawasi perputaran dana, melaporkan posisi keuangan Kepada Kepala Kelurahan, melakukan koordinasi dengan aparat

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

desa/kelurahan, memabangun jaringan kerja terhadap pihak-pihak terkait dalam rangka pengembangan lembaga UEK-SP.

b) Bendahara UEK-SP

Bertugas menerima, menyimpan, dan membayarkan uang berdasarkan bukti-bukti penerimaan dan pembayaran sah, melaksanakan pembukuan administrasi keuangan, melaporkan posisi keuangan kepada ketua UEK-SP sewaktu-waktu diperlukan.

c) Tata Usaha UEK-SP

Bertugas sebagai sekertaris yang mengkoordinir administrasi UEK-SP Makmur secara umum, pengarsipan dan pembuatan laporan secara rutin dan kontinu.

d) Staff Analisis UEK-SP

Bertugas melaksanakan pemeriksaan administrasi dan kelengkapan dokumen proposal dari pemanfaat dalam mengajukan pinjaman UEK-SP, serta melakukan penilaian kelayakan usulan dengan melakukan kunjungan laporan serta membuat dokumentasi akhir untuk dibahas dalam musyawarah khusus setiap bulan.

3.Kegiatan/Produk

Adapun jenis kredit yang telah digulirkan UEK-SP Makmur selama periode tahun tahun 2017/2018 masih meliputi berbagai bidang usaha yang ada seperti kredit Usaha perdagangan, perkebunan, jasa, perikanan, dan juga pertanian.

4. Pengakaran

Dana Usaha Kelurahan Tanah Merah merupakan tanggung jawab masyarakat melalui pengurus. Selama periode 2018 kegiatan ekonomi telah tercipta sedemikian rupa jelas terlihat dalam aneka penyaluran kredit dan jumlahnya. Dapat disimpulkan bahwa Kelurahan Tanah Merah untuk usaha kredit kecil sangat menjanjikan dan peluang inilah yang ingin diraih oleh UEK-SP Makmur. Dan dengan masuknya Dana Usaha Desa/Kelurahan ini pola-pola pengakaran maupun penguatan program amat penting dilakukan agar Dana Usaha Desa/Kelurahan ini berkembang.

Banyak yang dilakukan oleh UEK-SP Makmur untuk penguatan program ini. Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh UEK-SP Makmur adalah:

- a. Menghilangkan pemikiran dan pandangan negative terhadap Dana Usaha Desa/Kelurahan tersebut.
- b. Mengajak masyarakat untuk melaksanakan kontrol terhadap jalannya usaha simpan pinjam ini.
- c. Menciptakan rasa memiliki terhadap lembaga yang bersangkutan.
- d. Menumbuh kembangkan proses transparansi dalam pengelolaan dana ini.

Adapun program yang telah dilakukan untuk meningkatkan penangkaran di tahun 2018 yaitu:

- a. Sosialisasi Tingkat RT
- b. Sosialisasi tingkat RW
- c. Sosialisasi perwiran bapak-bapak

- d. Sosialisasi perwiritan ibu-ibu
- e. Setiap bulan melaporkan perkembangan UEK-SP dipapan informasi

5. Penggunaan Biaya

Penggunaan biaya diusahakan diperkecil sehingga keuntungan yang didapat akan besar. Hal ini berpegang teguh bahwa ketentuan pembiayaan tersebut berdasarkan aturan yang terdapat dalam AD/ART dan ketentuan-ketentuan lain. Penggunaan dana diprioritaskan kepada bidang sosial seperti memberikan bantuan kepada anak-anak yatim, orang tua jompo dan tuna netra selain itu juga untuk memberikan santunan kepada masyarakat dan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan dan sosial lain.

4.9 Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi

1) Pelaporan

Pelaporan pelaksanaan program mengikuti prosedur yang ada, dilakukan dengan cepat, tepat dan minimal harus menginformasikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Persiapan pelaksanaan dan peran serta masyarakat.
- b. Perkembangan penggunaan dana, dari berbagai jenis kegiatan yang terperinci dalam komponen dan kategori serta sumber pembiayaan program.
- c. Perkembangan pelaksanaan kegiatan keuangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

d. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan langkah-langkah yang akan di tempuuh

Pelaporan merupakan proses penyaluran informasi dari satu jenjang kepada jenjang diatasnya, informasi akan berguna apabila:

- a. Sesuai dengan kebutuhan (terkait dengan tugas dan tanggung jawab penerima laporan).
- b. Tepat waktu
- c. Akurat
- d. Berasal dari sumber yang tepat.

Mekanisme pelaporan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten dengan menganalisa laporan setiap tingkat atau jenjang.

2) Alur Pelaporan

Merupakan tanggung jawab Fasilitator Program Kabupaten yang ada dilapangan untuk mengumpulkan dan mengkonsolidasi data pada wilayah kerja mereka masing-masing dan melaporkan hasilnya setiap bulan kepada jenjang diatasnya. Adapun alur pelaporan seperti dibawah ini:

a.Pelaporan Jalur Fungsional, pelaporan untuk masing-masing jenjang pada jalur fungsional meliputi:

1. Rencana dan Realisasi kegiatan bulanan .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Laporan Kemajuan Kegiatan.
3. Laporan Keuangan Kegiatan.
4. Permasalahan yang dihadapi dan Langkah penanganannya.
5. Perkembangan pinjaman dan pengembalian
6. Rekonsiliasi rekening
7. Jumlah dan jenis usaha serta besarnya pinjaman.
8. Jumlahkelompok dan anggota pemanfaat.
9. Tingkat partisipasi masyarakat.

Tabel 4.5

Pelaporan Jalur Fungsional

Pengirim/ Fasilitator	Laporan Asli Dikirim	Tgl Pengiriman	Copy Laporan Dikirim Ke
Pendamping Desa/Kelurahan	Koordinator Kecamatan	Tgl 3 setiap bulan berikutnya	Kades
Koordinator Kecamatan	Koordinator Kabupaten	Tgl 9 setiap bulan berikutnya	Camat
Koordinator Kabupaten	TK-Kab	Tgl 5 setiap bulan berikutnya	Bupati

Sumber data: Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa/Kelurahan Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu 2017

b. Pelaporan Jalur struktural, pelaporan untuk masing-masing jenjang pada jalur struktural minimal meliputi:

1. Laporan kemajuan kegiatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Permasalahanyang dihadapi dan langkah penanganannya.
3. Jumlah dan jenis usaha serta besarnya pinjaman.
4. Jumlah kelompok dan anggota pemanfaat.
5. Tingkat partisipasi masyarakat.
6. Analisa dana evaluasi kegiatan
7. Kesimpulan dan saran/rekomendasi.

Tabel 4.6
Pelapor Jalur Struktural.

Pengirim	Laporan Asli Dikirim Ke	Tgl Pengiriman	Copy Laporan Dikirim Ke
Pengelola UEK-SP	Kades/Lurah	Tgl 2 setiap bulan berikutnya	Pendamping Desa/Kelurahan
Kades	Camat	Tgl 5 setiap bulan berikutnya	Koordinator Kecamatan
Camat	TK-Kab	Tgl 12 setiap bulan berikutnya	Koordinator Kabupaten
TK-Kab	Bupati	Tgl 20 setiap bulan berikutnya	Tim Pengaruh Kabupaten

Sumber data: Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa/Kelurahan Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu 2017

3) Jenis Pelaporan

- a. **Laporan Bulanan**, merupakan laporan rutin yang disampaikan setiap bulan oleh masing-masing jenjang tugas sesuai dengan alur pelaporan.
- b. **Laporan Insidentil**, bersifat khusus mendesak atau kasualistik serta dibuat diluar mekanisme laporan reguler.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Laporan tahunan, dibuat pada setiap akhir tahun kegiatan. Merupakan rekapitulasi perkembangan kegiatan PPD dan analisa manfaat dan dampak program. Dilengkapi dengan hasil kajian dan inovasi yang dilakukan selama periode kegiatan. Dan disampaikan paling lambat 1 bulan setelah berakhirnya periode pelaksanaan kegiatan.

4) Pelaporan UEK-SP

Ketua pengelola UEK-SP melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan keuangan kepada Kepala Desa/Kelurahan dengan tebusan kepada pendamping Desa/Kelurahan setiap bulannya disampaikan pada akhir bulan berjalan. Laporan UEK-SP Meliputi:

- a. Laporan Keuangan lengkap.
- b. Laporan perkembangan pinjaman dan pengembalian.
- c. Laporan permasalahan yang dihadapi dan langkah penanganan.
- d. Copy rekening Koran.
- e. Jumlah dan jenis usaha serta besarnya pinjaman.
- f. Jumlah kelompok dan anggota pemanfaat.
- g. Rencana kerja dan realisasi kegiatan UEK-SP.
- h. Perkembangan kegiatan simpan pinjam anggota.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada akhir tahun Pengelola UEK-SP membuat laporan tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahunan kepada masyarakat.

5) Pemantauan

Pemantauan adalah kegiatan pengumpulan informasi yang dilakukan dengan periodik untuk memastikan apakah suatu kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Pemantauan adalah proses yang dilakukan secara terus menerus, continue sepanjang periode program.

a. Prinsip Pemantauan

1. Pemantauan harus dilihat sebagai alat penting untuk memperbaiki program. Jika pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan baik semua pihak akan mendapatkan keuntungan karena ada banyak informasi yang diperoleh untuk memperbaiki pelaksanaan program dan juga untuk mempertimbangkan masa depan program.
2. Partisipasi dan transparansi dilaksanakan secara nyata agar seluruh pelaku program merasa bebas untuk berpartisipasi dan melaporkan berbagai masalah yang dihadapi serta memberikan kontribusinya untuk perbaikan program.
3. Mengumpulkan informasi seakurat mungkin dimaksudkan agar para pelaku program tidak hanya mau melaporkan apa yang dianggap menyenangkan untuk didengar oleh atasan. Jika mungkin, informasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut harus diuji silang dengan sumber lain untuk menjamin ketepatannya.

b. Pelaku Pemantauan

Pemantauan dapat dilakukan oleh semua pihak terutama pelaku-pelaku program:

1. Aparat Pemerintah pada berbagai tingkatan. (Tim koordinasi Pembinaan dan pengendalian Kabupaten, Camat, Kades/Lurah).
2. Anggota DPRD Kabupaten.
3. Fasilitator Program.
4. Kader Pembangunan Masyarakat Kelurahan.
5. Badan Permusyawaratan Desa/Kelurahan.
6. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan.
7. Lembaga Swadaya Masyarakat.
8. Media Massa.
9. Lembaga yang ditugaskan khusus untuk melakukan pemantauan.
10. Oleh pihak lain yang mempunyai kepentingan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Jenis Kegiatan Pemantauan

Pemanfaatan dalam PPD terbagi dua, mencakup:

1. Pemantauan Internal

Pemantauan internal adalah kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh para pelaku program yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam program.

Pemantauan Internal mencakup

- a. Pemantauan partisipatif oleh masyarakat.
- b. Pemantauan oleh Fasilitator Program Kabupaten.
- c. Pemantauan oleh Aparat Pemerintahan yang berwenang.
- d. Pemantauan penanganan pengaduan dan proses penyelesaian masalah.
- e. Studi kasus dan dokumentasi tentang beberapa pelajaran yang bisa dipetik.

2. Pemantauan Eksternal

Pemantauan eksternal adalah pemantauan yang dilakukan oleh pihak luar yang independen dan diharapkan dapat memberikan pandangan yang lebih objektif. Pemantauan eksternal berisi kumpulan data dan informasi tentang program yang dilakukan oleh Pantauan Independen oleh LSM dan Pemantauan oleh Wartawan Independen.



6. Evaluasi

Kegiatan Evaluasi dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana perkembangan/kemajuan yang telah dicapai dalam pelaksanaan program selama periode tertentu. Evaluasi dapat dilakukan secara parsial atau secara menyeluruh seluruh aspek pelaksanaan PPD yang memuat data serta analisa yang menyeluruh, sistematis serta objektif, untuk mengukur tingkat keberhasilan PPD sebagai sebuah program unggulan dalam mendukung upaya menanggulangi masalah kemiskinan, kebodohan dan ketertinggalan Infrastruktur (K21) di Provinsi Riau pada umumnya dan khususnya Kabupaten Indragiri Hulu. Dasar utama evaluasi program ini menggunakan Pedoman Evaluasi Program Pemberdayaan Desa (PPD) sesuai dengan kebutuhan Gubernur Riau NO.KTSP.537/XII/2005 tentang Penetapan Pedoman Evaluasi Kinerja Program Pemberdayaan Desa (PPD) Provinsi Riau, yang ditandatangani oleh Gubernur Riau Tanggal 13 Desember 2005.

a. Evaluasi Internal

Evaluasi internal PPD bertujuan antara lain:

1. Mengetahui capaian yang telah diperoleh selama berlangsungnya program, terutama menyangkut aspek PPD yaitu Pemberdayaan Masyarakat, Pengembangan Ekonomi dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Desa/Kelurahan.
2. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi di lapangan dalam upaya mencapai target yang telah ditetapkan oleh program.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Mencari akar permasalahan dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi tersebut.

Evaluasi internal diperlukan sebagai bahan masukan bagi perbaikan kinerja program kedepan, biasanya dilakukan pada tahun pertama, kedua, ketiga pelaksanaan PPD.

b. Evaluasi Eksternal

Evaluasi eksternal merupakan tindak lanjut dari evaluasi internal. Evaluasi eksternal biasanya dilakukan oleh tim evaluasi independen yang ditunjuk oleh pemerintah Kabupaten. Pelaksanaan evaluasi eksternal pada PPD direncanakan setelah tiga tahun pelaksanaan program. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui capaian kinerja program secara keseluruhan dan untuk mengetahui dampak program terhadap perkembangan masyarakat Kelurahan Tanah Merah lokasi PPD.

4.10 Penanganan dan Pengaduan Masalah

Dalam pelaksanaan PPD, terdapat prinsip transparansi dan partisipatif. Artinya semua kegiatan proses PPD dilaksanakan secara transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat. Salah satu indikator pelibatan masyarakat adalah adanya pengawasan yang dilakukan masyarakat terhadap kegiatan PPD. Peran serta masyarakat dalam pengawasan ditunjukkan dengan adanya pengaduan terhadap proses pelaksanaan PPD. Bentuk pengaduan sering kali disampaikan berupa informasi lisan maupun tertulis yang diajukan kepada pelaku PPD tingkat Desa, Kabupaten maupun Provinsi. Setiap masalah dan pengaduan

yang muncul harus segera ditanggapi secara serius dan proporsional serta tidak terlalu lama dibiarkan.

Pengaduan ini merupakan salah satu bahan masukan yang sangat berarti bagi pelaku PPD sebagai dasar evaluasi terhadap apa yang telah dilakukan, keseriusan pelaksanaan dengan prinsip dan tujuan PPD sehingga dapat meningkatkan kualitas, pelaksanaan kegiatan serta akan lebih memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Munculnya pengaduan terhadap pelaksanaan kegiatan merupakan wujud kontrol sosial atau pengawasan oleh masyarakat. Substansi pengaduan lebih banyak merupakan permasalahan-permasalahan yang timbul dilapangan, sehingga membutuhkan penanganan yang efektif, tepat waktu dan sasaran. Untuk itu dibutuhkan adanya tata cara dan prosedur sebagaimana acuan penanganannya. Dalam menangani pengaduan atau permasalahan yang dilakukan secara berjenjang. Sehubungan dengan hal tersebut menjadi sangat perlu diberikan kewenangan untuk memberikan tindak lanjut sesuai dengan kewenangan yang melekat pada tugas dan tanggung jawabnya.

Tujuan prosedur ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi pelaku semua Fasilitator Program dan Pelaku PPD lainnya dalam melakukan penanganan, umpan balik dan laporan perkembangan dan penanganan.

a. Prinsip-Prinsip Penanganan Masalah

Prinsip Penanganan Masalah dan Pengaduan antara lain:

1. Rahasia, identitas yang melaporkan Pengaduan harus dirahasiakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Berjenjang, semua pengaduan ditangani pertama kali oleh pelaku Program dijenjang Keberadaan Subyek yang diadakan.
3. Transparansi dan Partisipatif, artinya sejauh mungkin masyarakat harus diberitahu dan dilibatkan dalam proses penanganan pengaduan terhadap masalah yang ada diwilayahnya dengan difasilitasi oleh Fasilitator Program.
4. Proporsional, artinya penanganan sesuai dengan cakupan khususnya.
5. Objektif, sedapat mungkin dalam penanganan pengaduan ditangani secara objektif, artinya pengaduan yang muncul harus selalu diuji kebenarannya melalui mekanisme uji sialang.

b. Sistem dan Prosedur

1.Sumber Informasi

Pengaduan dapat diperoleh dari beberapa sumber:

- a. Warga masyarakat.
- b. Kelompok Masyarakat.
- c. Tokoh Masyarakat.
- d. LSM.
- e. Organisasi Masyarakat.
- f. Aparatur Pemerintahan.
- g. Wartawan.
- h. Dan sebagainya.

Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sejalan dengan prinsip berjenjang yang dianut maka pada setiap masalah yang muncul ditetapkan derajat masalah. Derajat masalah digunakan untuk menentukan pada tingkat mana suatu masalah harus mendapat dukungan. Penentuan derajat masalah dilakukan oleh Fasilitator Program dan dapat dilakukan revisi setiap rapat bulanan.

Adapun derajat masalah dibedakan menjadi:

- Derajat 1 : Dukungan penanganan oleh Pendamping Desa/Kelurahan
- Derajat 2 : Dukungan penanganan oleh Koordinator Kecamatan.
- Derajat 3 : Dukungan penanganan oleh Kordinator Kabupaten.

2. Kategori Jenis Pengaduan Masalah

Tabel.4.7

Kategori Jenis Pengaduan Masalah

KATEGORI	URAIAN
1	Pengaduan yang berkaitan dengan adanya penyimpanan prinsip dan prosedur
2	Pengaduan yang berkaitan dengan adanya penyimpangan, penyalahgunaan atau penyelewengan dana
3	Pengaduan yang berkaitan dengan adanya tindakan intervensi yang mengarah negative dan merugikan masyarakat maupun kepentingan Program.
4	Pengaduan yang berkaitan dengan adanya kejadian yang mengarah ke kondisi <i>Force Majeur</i> (Suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia).
5	Lain-lain yang tidak termasuk dalam kategori 1,2,3 dan 4

Sumber Data: Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa, Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Pasir Penyuh Tahun 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c.Tahapan Penanganan

Tahapan penanganan pengaduan adalah sebagai berikut:

1. Registrasi dan dokumentasi: registrasi atau pencatatan dan dokumentasi dimaksudkan sebagai mekanisme control, hal-hal yang perlu dicatat antara lain tanggal penerimaan, substansi pengaduan, identitas pengirim, hal yang diajukan,dll.
2. Pengelompokan dan distribusi: Pengaduan yang telah dicatat atau diregistrasikan dan didokumentasikan selanjutnya dikelompokkan berdasarkan jenjang subyek yang diajukan, isi pengaduan, status pengaduan.
3. Uji silang dan Analisa: kasus dari hasil pengaduan tersebut, selanjutnya dilakukan uji silang untuk mendapatkan kepastian pokok permasalahan yang muncul kepastian status khusus dan untuk mendapatkan informasi tambahan. Hasil uji silang merupakan masukan untuk menganalisis permasalahan yang muncul, sehingga meningkatkan akurasi penyusunan alternative penanganan. Hasil proses ini adalah rekomendasi tentang penanganan kasus. Analisis permasalahan harus menggambarkan risalah permasalahan, informasi hasil uji silang dan rekomendasi penanganan.
4. Tindak lanjut: didasarkan atas rekomendasi dari hasil uji silang dan analisis yang dilakukan secara berjenjang sesuai dengan wilayah kewenangan masing-masing. Tindakan tersebut dapat berupa,klarifikasi pengaduan kepada unsure terkait, penjelasan kembali kepada pelopor klarifikasi lanjutan dan investigasi langsung kelokasi kejadian atau yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diadukan, melakukan teguran dan pemberian sanksi kepada pelaku yang dinilai bersalah, menjelaskan kembali tentang proses atau prosedur yang seharusnya dilakukan, jika ada unsur tindakan pidana agar difasilitasi pengaduan melalui jalur hukum.

5. Pemantauan dan investigasi lanjutan: dimaksudkan sebagai alat kendali penanganan pengaduan, sehingga diketahui perkembangan penyelesaian masalahnya.
6. Penyelesaian masalah: mengendapkan prinsip transparansi dan partisipasi artinya proses penyelesaian harus dilakukan secara terbuka dan melibatkan masyarakat. Fasilitator program atau pelaku lainnya hanya memfasilitasi proses penyelesaiannya.
7. Umpan balik: merupakan tanggapan balik masyarakat terhadap penyelesaian masalah yang muncul hal ini dapat berupa menerima dan menganggap masalah tidak selesai atau perlu upaya lanjutan.
8. Pelaporan: kompilasi tentang pengaduan yang muncul dan tindak lanjut penanganan baik yang telah ditangani maupun dalam proses penyelesaian, dilaporkan sebagai kelengkapan bulanan yang dilaksanakan berjenjang.

Untuk masalah dengan kategori 2 yaitu pengaduan yang berkaitan dengan adanya penyimpangan, penyalahgunaan atau penyelewengan dana, khususnya oleh Fasilitator Program, maka tindakan lanjutnya dilakukan dengan menggelar Majelis Kode Etik. Dalam hal ini akan diatur dalam mekanisme tersendiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Peran Pelaku PPD Dalam Penanganan Masalah

Fasilitator program sangat besar perannya dalam memfasilitasi masyarakat untuk melakukan penanganan masalah, termasuk melakukan pemantauan terhadap proses penanganannya.

1. Masalah Dinyatakan Selesai

Tahapan ini bisa dilakukan sebagai tahapan akhir pada proses penanganan masalah. Dimana suatu masalah yang diadukan sampai pada tahap dinyatakan selesai. Pada prinsipnya suatu masalah dinyatakan selesai apabila masyarakat dalam forum menyatakan demikian, dengan tetap mengacu pada panduan yang ada.